

---

# Penelitian Kebijakan Pendidikan

---

*(Education Policy  
Research)*

---

Sigit Purnama

*Makalah disampaikan dalam diskusi  
kelas Program Doktor Teknologi  
Pembelajaran Universitas Negeri  
Malang*

*30 November 2010*

---

## Daftar Isi

Halaman Cover .....	1
Daftar Isi .....	2
Bab I Pendahuluan .....	3
Bab II Pembahasan .....	5
A. Pengertian Penelitian Kebijakan .....	5
B. Pengertian Penelitian Kebijakan Pendidikan .....	7
C. Ciri-Ciri Penelitian Kebijakan .....	9
D. Karakteristik Penelitian Kebijakan .....	10
E. Pendekatan Analisis Penelitian Kebijakan .....	11
F. Metode Penelitian Kebijakan .....	13
G. Langkah-Langkah Penelitian Kebijakan .....	16
Bab III Penutup .....	19
Daftar Pustaka .....	20

## Bab I

### PENDAHULUAN

Dewasa ini, pendidikan telah memasuki dan menjadi bagian tak terpisahkan dari kawasan publik. Lihatlah misalnya, ketika pemerintah membuat dan melaksanakan kebijakan Ujian Nasional (UN). Masyarakat terbelah menjadi dua kutub yang saling berseberangan, ada yang pro dan kontra dengan kebijakan tersebut. Artinya, UN tidak hanya menjadi bagian/urusan segelintir orang atau kelompok tertentu, tetapi menjadi bagian/urusan masyarakat Indonesia pada umumnya. Dengan demikian, UN sebagai sebuah produk kebijakan pendidikan telah menjadi kebijakan publik.

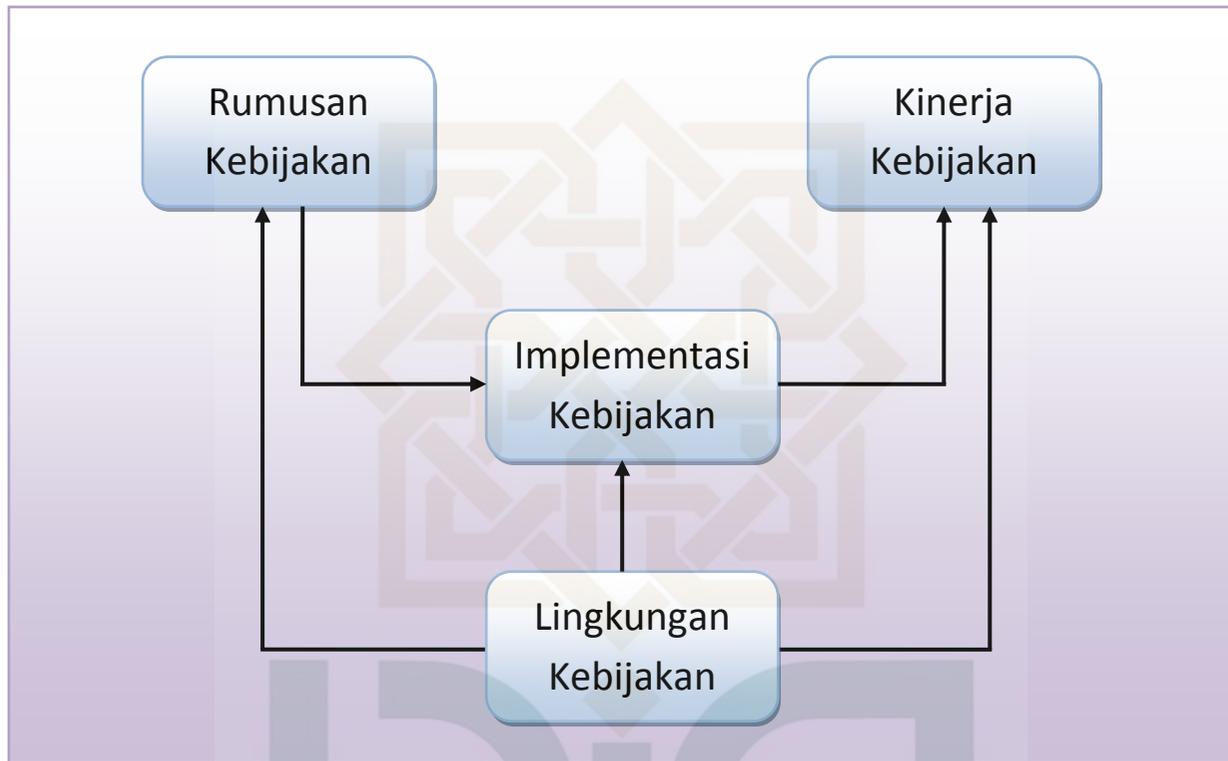
Bambang (2008) memberikan pertimbangan rasional mengenai kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik. *Pertama*, kebijakan pendidikan mempunyai dampak terhadap masyarakat secara luas. *Kedua*, untuk mengimplementasikan kebijakan pendidikan diperlukan dana publik yang sangat besar, bahkan alokasi dana untuk pendidikan merupakan alokasi terbesar jika dibanding dengan alokasi dana untuk sektor publik lainnya.

Pertanyaannya, apa itu kebijakan publik? Dan, apa itu kebijakan pendidikan? Menurut Nugroho (2009) kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh Negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan dari Negara yang bersangkutan. “Keputusan” dalam konteks ini termasuk juga pemerintah memutuskan untuk “memutuskan” atau memutuskan untuk “tidak mengurus” isu terkait. Dalam prakteknya bentuk kebijakan pemerintah tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Adapun kebijakan pendidikan merupakan keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang

dijabarkan dari visi, misi pendidikan, dalam rangka untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk suatu kurun waktu tertentu.

Bagaimana sebuah kebijakan terbentuk? Semua produk kebijakan publik, termasuk kebijakan pendidikan terbentuk melalui sebuah rangkaian proses. Nugroho (2009) menyebutkan empat proses kebijakan publik, yaitu rumusan, implementasi, kinerja, dan lingkungan. Rangkaian proses ini dapat diilustrasikan sebagai berikut:



Gambar 1 Proses kebijakan (Nugroho, 2009)

Efektivitas kebijakan pendidikan yang dinamis memerlukan dukungan informasi yang secara sistematis dan ekstensif. Penelitian sosial (pendidikan) dapat menjadi sumber informasi yang sesuai dengan kriteria tersebut. Pada posisi inilah pentingnya penelitian kebijakan pendidikan, yaitu memberikan informasi yang sistematis dan ekstensif agar kebijakan-kebijakan pendidikan dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien.

## Bab II

### PEMBAHASAN

#### A. Pengertian Penelitian Kebijakan

Apa itu penelitian kebijakan? Danim (2005) memberikan pemahaman tentang penelitian kebijakan dengan membedakannya dengan penelitian tradisional. Menurutnya ada dua macam penelitian, yaitu penelitian tradisional (*traditional research*) dan penelitian kebijakan (*policy research*). Penelitian tradisional dalam konteks ini bukan dalam kapasitas untuk dibandingkan dengan penelitian kebijakan sebagai penelitian modern, tetapi lebih karena sifat khasnya saja. Sifat khas penelitian kebijakan itu sendiri terletak pada fokus masalahnya, dimana aplikasi kerja penelitian ini untuk keperluan pembuatan kebijakan.

Ann Majchrzak seperti dikutip Danim (2005) mendefinisikan penelitian kebijakan sebagai proses penyelenggaraan penelitian untuk mendukung kebijakan atau analisis terhadap masalah sosial yang bersifat fundamental secara teratur untuk membantu pengambil kebijakan memecahkan masalah dengan jalan menyediakan rekomendasi yang berorientasi pada tindakan atau tingkah laku pragmatik. Rekomendasi yang berorientasi pada tindakan atau tingkah laku pragmatik merujuk pada hasil penelitian, dimana yang perlu dihasilkan dalam penelitian kebijakan bukan terletak pada sampai mana bobot ilmiah sebuah hasil penelitian, namun sampai mana hasil penelitian memiliki aplikabilitas dalam rangka memecahkan masalah sosial.

Pemahaman tentang penelitian kebijakan sering dikacaukan dengan analisis kebijakan. Nugroho (2009) membedakan analisis

kebijakan menjadi dua, yaitu analisis untuk kebijakan dan analisis tentang kebijakan. Analisis tentang kebijakan sejajar atau dapat dipahami sebagai sinonim dari penelitian kebijakan, yaitu suatu penelitian tentang suatu kebijakan yang sudah ada. Sedangkan analisis kebijakan adalah sebuah kegiatan yang dilakukan sebelum perumusan kebijakan.

Analisis dan penelitian kebijakan juga dapat dibedakan dengan monitoring dan evaluasi kebijakan. Untuk lebih jelas memahami masing-masing perbedaannya, perhatikan tabel di bawah ini:

Tabel 1. Perbedaan antara analisis, monitoring, evaluasi dan penelitian kebijakan (Nugroho, 2009)

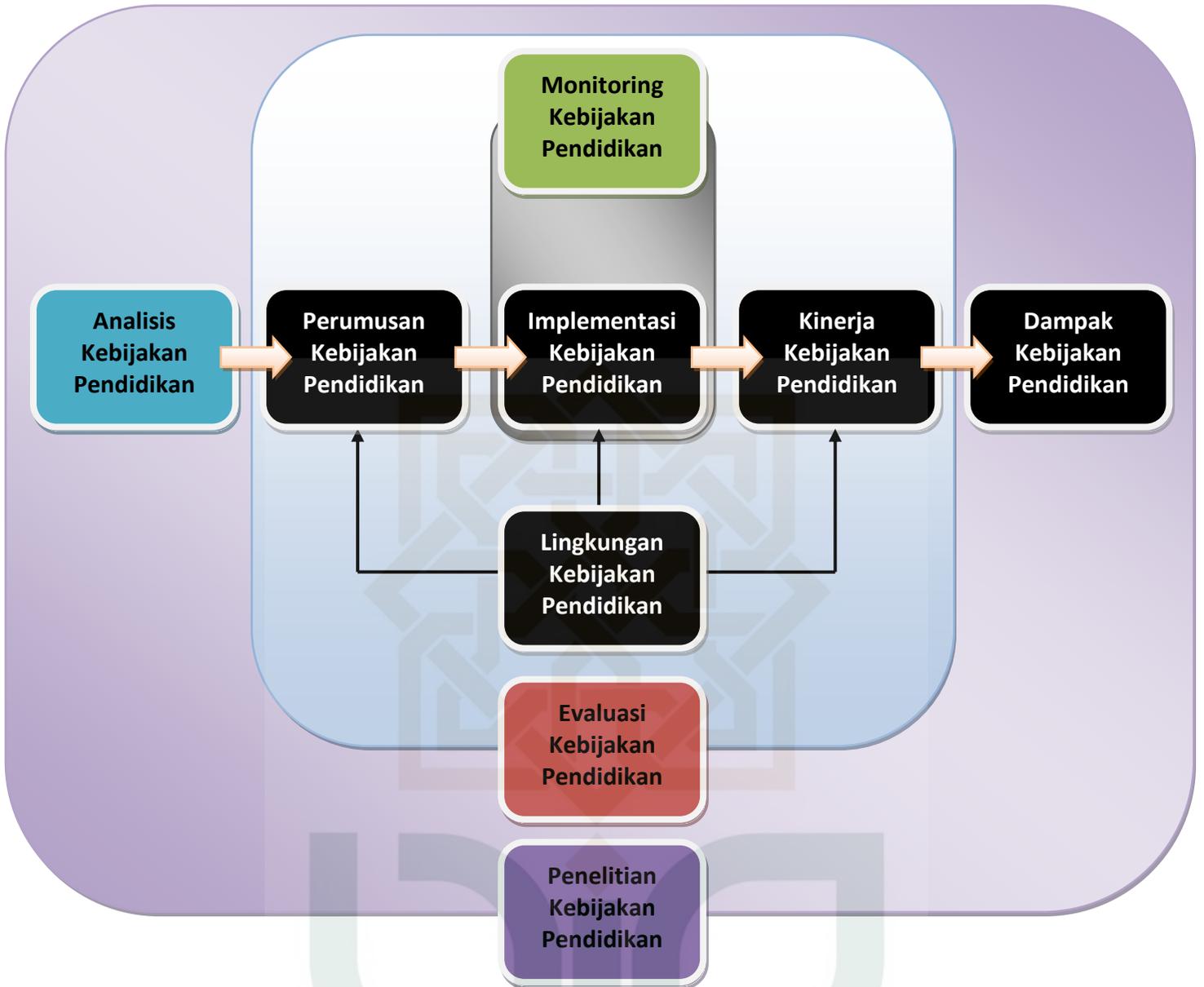
	<b>Analisis Kebijakan</b>	<b>Monitoring Kebijakan</b>	<b>Evaluasi Kebijakan</b>	<b>Penelitian Kebijakan</b>
<b>Produk (output)</b>	Nasehat, advis, dan/atau rekomendasi kebijakan	Laporan perkembangan (progress report)	Penilaian terhadap sebagian ataupun seluruh dimensi dari proses kebijakan	Pemahaman yang mendalam akan suatu kebijakan
<b>Pendekatan (kecenderungan)</b>	Ilmu Kebijakan	Pragmatis/ Praktis	Strategis	Metodologis
<b>Waktu Pelaksanaan (timing)</b>	Pra-Kebijakan	Pada saat kebijakan diimplementasikan	Pasca (implementasi) kebijakan	Pra, implementasi atau pasca (implementasi)
<b>Pelaksana</b>	Analisis Kebijakan	Pengawas program	Tim Evaluasi Kebijakan	Lembaga keilmuan (universitas, dll)
<b>Lama (durasi)</b>	Sangat pendek hingga pendek	Sepanjang implementasi	Menengah	Pendek hingga panjang

## B. Pengertian Penelitian Kebijakan Pendidikan

Dari pemaparan tentang berbagai definisi penelitian kebijakan di atas, jika kita kaitkan dengan berbagai bidang social-kehidupan, khususnya pendidikan sebagai kebijakan publik, maka yang membedakan adalah objek penelitiannya saja. Dengan demikian, penelitian kebijakan pendidikan dapat didefinisikan sebagai suatu penelitian tentang suatu kebijakan pendidikan yang sudah ada.

Penelitian kebijakan pendidikan dapat dibedakan dengan analisis, monitoring, evaluasi kebijakan pendidikan. Analisis kebijakan pendidikan adalah suatu kegiatan yang dilakukan sebelum perumusan kebijakan pendidikan, atau merupakan proses inisiasi dari perumusan kebijakan pendidikan. Monitoring kebijakan pendidikan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan ketika sebuah kebijakan pendidikan diimplementasikan dilapangan sehingga perkembangan sebuah pelaksanaan kebijakan pendidikan dapat diketahui. Evaluasi kebijakan pendidikan adalah kegiatan yang dilakukan setelah kebijakan pendidikan dilaksanakan mencakup penilaian terhadap sebagian atau seluruh dimensi dari proses kebijakan pendidikan.

Kebijakan pendidikan, sebagaimana kebijakan-kebijakan pada bidang-bidang lainnya, merupakan proses kebijakan publik yang terdiri dari rumusan kebijakan pendidikan, implementasi kebijakan pendidikan, kinerja kebijakan pendidikan dan lingkungan kebijakan. Dengan demikian, penelitian kebijakan pendidikan dapat dilakukan pada semua sisi proses kebijakan pendidikan, namun tidak untuk tujuan utama rekomendasi kebijakan, karena tujuan utamanya adalah *verstehen* (melakukan pemahaman yang mendalam terhadap suatu kebijakan pendidikan), dan dapat dilakukan dalam kurun waktu yang panjang, sesuai dengan ketercapaian pemahaman yang mendalam tersebut (adaptasi dari Nugroho, 2009). Lokus dan ruang penelitian kebijakan pendidikan dapat diilustrasikan seperti gambar berikut ini.



Gambar 2 Lokus dan ruang penelitian kebijakan pendidikan (modifikasi dari Nugroho, 2009)

Dari gambar di atas, khusus untuk penelitian kebijakan pendidikan dapat dijelaskan cakupannya sebagai berikut:

1. Penelitian tentang isi kebijakan pendidikan, yaitu penelitian untuk menilai suatu kebijakan dari sisi muatan atau isinya. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah analisis isi, baik yang bersifat kuantitatif (frekuentif, semantik) atau bersifat kualitatif (bingkai semiotik, kecenderungan politik, filosofis), maupun

komparatif, misalnya perbandingan antara UU Sisdiknas Nomor 2 Tahun 1989 dengan UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003.

2. Penelitian tentang implementasi kebijakan pendidikan, yaitu penelitian tentang bagaimana suatu kebijakan diterapkan.
3. Penelitian tentang kinerja kebijakan pendidikan, yaitu penelitian yang berkenaan dengan pencapaian dari kebijakan pendidikan dibandingkan dengan target atau rencana pencapaian yang diharapkan. Metode yang dapat digunakan adalah metode *gap analysis* (analisis kesenjangan).
4. Penelitian tentang lingkungan kebijakan pendidikan, yaitu penelitian yang berkenaan dengan pengaruh lingkungan kebijakan terhadap perumusan suatu kebijakan, implementasi kebijakan, dan kinerja suatu kebijakan pendidikan.
5. Penelitian tentang proses kebijakan pendidikan, yaitu penelitian yang berkenaan dengan bagaimana suatu kebijakan pendidikan berproses secara kelembagaan, yang mencakup: proses perumusan, rumusannya, implementasi, kinerja yang dicapai, dan lingkungan di mana kebijakan pendidikan tersebut berada.

### **C. Ciri-Ciri Penelitian Kebijakan**

Pada pembahasan sebelumnya, penulis telah memaparkan bahwa penelitian kebijakan itu memiliki ciri-ciri khas tertentu yang dapat dikatakan berbeda dengan jenis-jenis penelitian lainnya. Apa saja ciri-ciri umum penelitian kebijakan? Rosyada (2010) mengidentifikasi ciri-ciri umum penelitian kebijakan sebagai berikut:

1. *Basic social research*; yakni penelitian kebijakan harus dilaksanakan sesuai prosedur kerja ilmiah
2. *Technical social research*; yakni bahwa penelitian kebijakan harus mampu merumuskan kebijakan-kebijakan strategis yang dapat dikembangkan instrumen-instrumen teknisnya

3. *Policy research*; harus menghasilkan sebuah kebijakan publik
4. *Komprehensif*; yakni penelitian kebijakan harus menjangkau seluruh variabel yang terkait dan relevan dengan persoalan yang sedang dikaji untuk dirumuskan kebijakan penyelesaiannya.

#### **D. Karakteristik Penelitian kebijakan**

Selain memiliki ciri-ciri umum, penelitian kebijakan juga memiliki ciri-ciri khusus. Rosyada (2010) menyebutkan ciri-ciri khusus penelitian kebijakan sebagai berikut:

1. Memiliki fokus multidimensional
  - a. Penelitian kebijakan harus menjangkau seluruh variabel yang terkait dengan permasalahan yang sedang dirancang kebijakan untuk penyelesaiannya.
  - b. Penelitian kebijakan harus menjangkau seluruh variabel yang terkait dengan gagasan atau ide pengembangan sebagai upaya melakukan perubahan-perubahan pendidikan/sosial.
2. Bersifat induktif-empirik
  - a. Perumusan teori (bahan kebijakan) berbasis data, bukan berbasis teori
  - b. Tidak dimulai dengan perumusan proposisi dan hipotesis
  - c. Berbasis teori *verstechien*, tetapi tidak selalu mencari makna, karena kebijakan memerlukan indeks angka
  - d. Dikembangkan dengan teori psikologi-ekologis
  - e. Dengan demikian, data penelitian harus diolah dengan menghitung frekuensi dan distribusi frekuensi
  - f. Data penelitian kebijakan harus diolah dan dianalisis dengan berbagai model analisis, dari analisis kecenderungan, ketergantungan dan ramalan.
3. Berorientasi ke depan dengan memperhatikan kejadian sebelumnya

- a. Penelitian kebijakan harus berorientasi ke masa depan (visioner)
  - b. Penelitian kebijakan harus mampu menjelaskan ramalan yang terukur dan meyakinkan seluruh pemangku kepentingan
  - c. Penelitian kebijakan harus memiliki dialektika sejarah dengan kejadian sebelumnya
4. Berorientasi permintaan pemangku kepentingan
    - a. Penelitian kebijakan harus sesuai dengan hasil penilaian terhadap kebutuhan dan permintaan target grup dari kebijakannya itu
    - b. Penelitian kebijakan harus menghasilkan rumusan-rumusan yang implementatif, mudah dikontrol dan bahkan bisa diintervensi
  5. Melahirkan rumusan yang meyakinkan dengan menjelaskan nilai lebih dari kebijakannya itu sehingga masyarakat bisa menerima karena rasionalismenya bukan karena otoritarianisme kekuasaan.

## **E. Pendekatan Analisis Penelitian Kebijakan**

Untuk menganalisis data penelitian kebijakan seorang peneliti dapat menggunakan beberapa pendekatan. Dunn (1995) menyebutkan tiga pendekatan analisis penelitian kebijakan, yaitu:

- a. Pendekatan empiris adalah untuk menjelaskan sebab dan akibat dari kebijaksanaan publik. Misalnya, pendekatan ini digunakan untuk menggali informasi tentang bagaimana kebijakan Kementerian Agama terhadap penyandang cacat dalam bidang pendidikan.
- b. Pendekatan evaluatif adalah untuk menentukan harga atau nilai dari beberapa kebijaksanaan. Misalnya, pendekatan ini digunakan untuk menggali data tentang apa saja peraturan yang telah dikeluarkan, apa saja program yang telah dibuat dan

dilaksanakan, serta fasilitas apa saja dari Kementerian Agama yang dapat diakses oleh penyandang cacat yang belajar di satuan pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama.

- c. Pendekatan normatif untuk mengakomodir pengusulan arah tindakan yang dapat memecahkan problem-problem kebijaksanaan. Misalnya, pendekatan ini digunakan untuk menggali data tentang sejauhmana penyandang cacat memperoleh manfaat dari kebijakan Kementerian Agama dalam demokratisasi pendidikan.

Selain menggunakan pendekatan yang telah direkomendasikan oleh Dunn tersebut, seorang peneliti dapat pula menggunakan pendekatan-pendekatan seperti tersebut di bawah ini:

- a. *Institutional model* : terkait dengan lembaga yang membuat dan melegitimasi kebijakan, serta bagaimana lembaga tersebut menggunakan kekuasaan agar kebijakan yang dibuat dilaksanakan
- b. *Process model*: evaluasi dan analisis kebijakan yang menggunakan model proses, mengikuti langkah sebagai berikut: (1) identifikasi masalah dan keuntungan untuk pembuat kebijakan, (2) formulasi rancangan kebijakan oleh berbagai pihak yang berkepentingan (legistatif, staf ahli, kelompok-kelompok yang berkepentingan), legitimasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan
- c. *Rational model*: analisis kebijakan dari sudut pandang teori pilihan rasional (*rational choice theory*), seberapa besar keuntungan sosial yang akan diperoleh dibanding dengan biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan kebijakan.
- d. *Incremental model*: review sistematis terhadap kebijakan dalam kurun waktu tertentu, dengan dasar pemikiran bahwa suatu kebijakan selalu merupakan kelanjutan, perubahan atau bagian dari kebijakan lain yang sudah pernah ada

- e. *Group model*: analisis kebijakan dari sudut pandang peran sistem politik sebagai penegak dan pendorong terselenggaranya kompromi di antara berbagai macam konflik kepentingan dalam masyarakat
- f. *Elite model*: kebijakan hampir selalu merupakan refleksi kepentingan individu/kelompok yang memiliki kekuasaan dalam masyarakat, dan tidak dikonstruksi untuk kepentingan masyarakat luas
- g. *Six-steps model*: analisis kebijakan yang mengacu pada 6 langkah standar, yaitu: (1) memverifikasi, mendefinisi, dan memerinci problematika, (2) menetapkan kriteria evaluasi, (3) mengidentifikasi kebijakan alternatif, (4) mengevaluasi kebijakan alternatif, (5) memaparkan dan menunjukkan perbedaan di antara kebijakan alternatif, dan (6) memonitor implementasi kebijakan (Kemenpora, 2010).

## **F. Metode penelitian kebijakan**

Banyak metode penelitian yang dapat digunakan atau dikombinasikan dalam penelitian kebijakan. Nazir (1985) merekomendasikan lima metode penelitian, yaitu:

1. Metode sejarah, yang menggunakan pendekatan historis dengan menggunakan catatan observasi atau pengamatan orang lain yang tidak dapat diulang-ulang kembali.
2. Metode deskripsi, yaitu suatu metode untuk meneliti atau mendeskripsikan status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Metode deskripsi ini dapat dibagi lagi menjadi: metode survey, metode deskripsi berkesinambungan, metode studi kasus, metode analisis pekerjaan atau aktivitas, metode studi komparatif, dan metode studi waktu dan gerakan.

3. Metode eksperimen, yaitu metode penelitian di bawah kondisi buatan oleh peneliti, yang akhirnya seorang peneliti dapat melakukan manipulasi dan mengontrol objek penelitian.
4. Metode *grounded research*, yaitu suatu metode penelitian yang mendasarkan diri pada fakta dengan tujuan melakukan generalisasi, menetapkan konsep-konsep, membuktikan teori dan menemukan teori. Metode ini pada hakekatnya merupakan proses pencarian data sebanyak-banyaknya, yang diawali dengan fase memasuki kerja lapangan tanpa berbekal hipotesis, mendeskripsikan peristiwa atas dasar observasi dan memformulasikan penjelasan perihal munculnya peristiwa itu atas dasar observasi.
5. Metode penelitian tindakan, yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk menetapkan suatu desain keputusan di masa depan.

Selain kelima metode penelitian di atas, menurut Nugroho (2009) ada dua metode penelitian lain yang relatif baru dan banyak dikembangkan pada penelitian dalam bidang ilmu komunikasi, yaitu:

1. Metode analisis isi (*content analysis*), yaitu suatu teknik yang sistematis dan dapat diulang untuk memilah kata-kata dalam jumlah besar menjadi sejumlah kata-kata yang dikategorisasi sesuai dengan koding yang dikehendaki. Metode ini mengalami perkembangan, sehingga saat ini dikenal adanya analisis wacana (*discourse analysis*) dan analisis bingkai atau analisis latar belakang isu (*framing analysis*). Sebuah penelitian kebijakan tidak sebatas meneliti isi sebuah produk kebijakan, tetapi lebih dari meneliti latar belakang lahirnya sebuah kebijakan.
2. Metode penelitian jaringan, yaitu metode penelitian untuk menemukan jaringan sosial dalam sistem sosial. Metode penelitian ini merupakan alternatif bagi penelitian yang atomistik (yakni: individu atau lembaga sebagai unit analisis), karena menjadikan jaringan (komunikasi) antar individu sebagai unit analisisnya.

Metode-metode yang telah disebutkan di atas telah direkomendasikan para ahli penelitian untuk digunakan dalam penelitian kebijakan. Meskipun demikian, dalam menetapkan suatu metode atau mengkombinasikan beberapa metode, seorang peneliti hendaknya menyesuaikannya dengan fokus masalah yang akan diteliti. Dalam hal ini, Majchrzak (dalam Danim, 2005) memberikan lima petunjuk dasar untuk merancang metodologi penelitian kebijakan, yaitu:

1. Secara ideal penelitian kebijakan adalah penelitian yang mengkombinasikan beberapa metode penelitian yang berbeda, misalnya metode kualitatif dan kuantitatif. Kombinasi semacam itu mempunyai banyak keuntungan, seperti: validitasnya lebih tajam, hasilnya lebih mantap, dan menambah keluasan wawasan. Ada beberapa variasi kombinasi metode kualitatif dengan metode kuantitatif atau sebaliknya, yaitu:
  - a. Fokus utama data kualitatif dan data kuantitatif bersifat sebagai pelengkap;
  - b. Fokus utama data kuantitatif dan data kualitatif bersifat sebagai pelengkap;
  - c. Fokus utama data yang dicari di lapangan ditentukan oleh ketersediaan data;
  - d. Analisis data kuantitatif dan selanjutnya dibahas secara kualitatif;
  - e. Deskripsi atau analisis kualitatif dengan disertai bukti-bukti kuantitatif.
2. Peneliti dapat menggunakan pendekatan empiris-induktif, antar aksi masalah sosial yang berbeda untuk dicarikan pemecahannya. Dalam penelitian kebijakan, metodologi yang disusun dimungkinkan untuk diadaptasi secara rutin (tidak kaku) dalam konteks interaksinya dengan masalah.
3. Metodologi harus lebih didasarkan atas pertanyaan penelitian
4. Oleh karena adanya keterbatasan waktu dan sumber studi yang secara tipikal dihadapi peneliti kebijakan, seorang peneliti dapat

menggunakan instrumen yang sudah ada/tersedia, seperti: instrumen tes intelegensia, tes kecenderuangan kepribadian, dan instrument-instrumen lain yang telah divalidasi.

5. Seorang peneliti kebijakan hendaknya merefleksi lingkungan social-politik di mana penelitian dilakukan. Rancangan metodologi harus responsif terhadap berbagai kritik terutama berkenaan dengan validitas studi, iklim politik, kondisi social yang senantiasa berubah yang kemungkinan memberi efek terhadap kesimpulan

## **G. Langkah-Langkah Penelitian Kebijakan**

Danim (2005) mengungkapkan bahwa penelitian kebijakan dilaksanakan dengan menempuh langkah-langkah yang secara umum sama dengan penelitian tradisional. Perbedaan utamanya terletak pada telaah pustaka dan perumusan rekomendasi hasil studi. Telaah pustaka dalam penelitian kebijakan sifatnya bukan *predetermined theory* atau *predefined theory* (berbasiskan teori), tetapi berdasarkan data. Sifat rekomendasinya tidak sama dengan rumusan rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian tradisional. Rumusan rekomendasi yang dibuat harus dianalisis ulang untuk kemungkinan dimodifikasi.

Majchrzak (dalam Danim, 2003) mengemukakan lima langkah penelitian kebijakan, yaitu:

1. Persiapan. Tujuan utama dari langkah pertama ini adalah diperolehnya informasi yang memadai untuk menentukan fokus studi penelitian kebijakan yang akan dilakukan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada langkah persiapan terfokus pada pembahasan mencakup:
  - a. Jenis-jenis informasi/data awal yang harus dikumpulkan dan cara mengumpulkan
  - b. Metodologi pengumpulan informasi/data
  - c. Isu-isu yang terkait dengan keputusan pelaksanaan penelitian kebijakan

d. Alat untuk menjaring data awal dan data penelitian

Secara spesifik informasi awal yang diperlukan peneliti kebijakan mencakup:

a. Isu-isu yang muncul secara temporal dan kekinian, antara lain:

- 1) Latar belakang pembuatan kebijakan
- 2) Bentangan rumusan dari dan nilai-nilai yang terkandung dalam masalah-masalah sosial
- 3) Tipe rekomendasi pemecahan masalah yang paling mungkin dirumuskan dan aplikatif
- 4) Sumber-sumber yang dibutuhkan dan tersedia bagi peneliti kebijakan

b. Konteks pembuatan kebijakan masa lalu

c. Sumber-sumber studi yang akan digunakan, mencakup: uang/dana, alat, bahan, dan personel yang ahli.

d. Tipe rekomendasi penelitian yang dikehendaki. Ada tiga tipe rekomendasi, yaitu:

- 1) perubahan pelengkap (*incremental*) adalah perubahan yang fokusnya berskala kecil dengan target jangka pendek.
- 2) Perubahan fundamental/mendasar; mengacu pada daya jangkauan jauh, menawarkan perubahan yang ekstrim.
- 3) Perubahan *mixed scanning*; meliputi formulasi dari arah baru yang fundamental, yang dalam prakteknya dapat dimodifikasi secara *incremental* sepanjang waktu.

e. Ancaman-ancaman yang muncul jika masalah yang ada tidak dipecahkan

f. Kekuatan dan peluang-peluang yang ada pada sistem.

2. Konseptualisasi studi. Langkah ini mencakup tiga aktivitas, yaitu:

a. Mengembangkan model preliminary (paradigma penelitian) tentang masalah sosial. Sebagai contoh: "Kualitas pendidikan siswa di daerah terpencil lebih rendah daripada siswa di

daerah perkotaan” dapat dipandang dari sudut pandang yang berbeda-beda (politik, psikologi, ekonomi, dll).

- b. Merumuskan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang spesifik
  - c. Memilih anggota peneliti, bisa terdiri atas: konsultan penelitian, ketua tim peneliti, anggota peneliti, tenaga teknis, tenaga administrasi, dan tenaga lapangan (jumlah masing-masing anggota dan tenaga menyesuaikan).
3. Analisis teknikal (mencakup subbab II H). Analisis data atau informasi yang diperoleh selama penelitian dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu analisis kualitatif, analisis kuantitatif atau mengkombinasikan keduanya untuk mendapatkan hasil penelitian kebijakan dan rekomendasi penelitian yang optimal.
  4. Perumusan rekomendasi
  5. Mengkomunikasikan hasil studi

## Bab III

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan, hal-hal sebagai berikut:

1. Penelitian kebijakan pendidikan adalah suatu penelitian tentang kebijakan pendidikan yang telah ada. Kebijakan pendidikan merentang dari proses perumusan, implementasi, kinerja, dan lingkungan kebijakan pendidikan.
2. Penelitian kebijakan pendidikan dapat dibedakan dengan analisis, monitoring, dan evaluasi kebijakan pendidikan. Analisis kebijakan pendidikan adalah merupakan proses inisiasi dari perumusan kebijakan pendidikan. Monitoring kebijakan pendidikan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan ketika sebuah kebijakan pendidikan. Evaluasi kebijakan pendidikan adalah kegiatan yang dilakukan setelah kebijakan pendidikan.

#### B. Catatan

1. Kebijakan pendidikan merupakan suatu wilayah kajian penelitian yang cukup luas. Kebijakan pendidikan juga mencakup teknologi pembelajaran, misalnya: kebijakan diseminasi, pemanfaatan produk-produk teknologi pembelajaran, kesempatan belajar, dan lain sebagainya.
2. Hasil meta-analisis penelitian disertasi UM menunjukkan bahwa desain penelitian kebijakan pendidikan sangat minim digunakan (hanya 1 buah). Hal ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menggunakan desain penelitian ini dalam penelitian-penelitian di bidang teknologi pembelajaran.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asisten Deputi Iptek Olahraga. 2010. *Panduan Penelitian Evaluasi dan Penelitian Kebijakan Olahraga*. Jakarta: Deputi Iptek Olahraga Kemenpora.
- Danim, S. 2005. *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- Dunn, W.N. 2003. *Analisa Kebijakan Publik*. (peny.: Muhadjir Darwin). Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Mayer, R.R. & Greenwood, E. 1984. *The Design of Social Policy Research*. (terj. Sutan Zanti Arbi & Wayan Ardana). Jakarta: Rajawali.
- Nazir, M. 1985. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Noeng, M. 2003. *Metodologi Penelitian Kebijakan dan Evaluation Research*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Nugroho, R. 2009. *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Rahardjo, M. 2010. *Pengantar Analisis Kebijakan Pendidikan*, (online), (<http://mudjjarahardjo.com/materi-kuliah/111-pengantar-analisis-kebijakan-pendidikan.html>), diakses 25 November 2010.
- Rosyada, D. 2010. *Penelitian Kebijakan*, (online), (<http://www.scribd.com/doc/24000181/penelitian-Kebijakan>), diakses 11 November 2010.
- Tilaar, H.A.T. & Nugroho, R. (2009). *Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.